

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

---

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 09
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 18 Juni 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK-IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	: Membahas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Sementara (Hapsem) Badan Pemeriksa Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018, Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2019, Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2020, dan isu-isu aktual bidang kelautan dan perikanan
Ketua Rapat	: Edhy Prabowo, MM., MBA.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo
Hadir	: A. 34 Anggota dari 47 Anggota Komisi IV DPR RI B. Hadir Pemerintah: 1. Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan); 2. Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc (Sekretaris Jenderal dan Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan); 3. Dr. Muhammad Yusuf, SH., MM. (Inspektur Jenderal); 4. M. Zulficar Mochtar, ST., M.Sc (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap); 5. Dr. Ir. Slamet Soebjakto M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya); 6. Brahmantya Satyamurti Poerwadi, ST. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut); 7. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan); 8. Dr. Ir. Rina, M.Si (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan); dan 9. Dr. Agus Suherman (Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Sementara (Hapsem) Badan Pemeriksa Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018, Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2019, Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2020, dan isu-isu aktual bidang kelautan dan perikanan, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat Dr. Michael Wattimena, SE., MM. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbesar serapan anggaran dengan meningkatkan kualitas kinerja sehingga Opini WTP dapat dipertahankan.
2. Komisi IV DPR RI menerima laporan atas tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) BPK Semester II Tahun 2018 dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menyelesaikan keseluruhan Hapsem BPK Tahun 2018.
3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas realisasi APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp1.907.929.654.755,00 atau 34,76% dari Pagu APBN Tahun 2019 sebesar Rp5.483.013.769.000,00.
4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2020 sebesar Rp6.472.753.539.000,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp523.623.761.000,00;
  - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp77.267.955.000,00;
  - c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp726.554.240.000,00;
  - d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp739.572.614.000,00;
  - e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.062.575.107.000,00;
  - f. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp366.017.696.000,00;
  - g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp507.850.023.000,00;
  - h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.868.216.557.000,00; dan
  - i. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp601.075.586.000,00.Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersama Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan pendalaman untuk membahas berdasarkan program dan kegiatan secara lebih detail sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di beberapa provinsi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat menerapkan tatakelola yang baik, serta akuntabel di setiap program-program untuk dapat meningkatkan kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam serta Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

Menteri  
Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

**Susi Pudjiastuti**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Dr. Michael Wattimena, SE., MM.**  
**A-457**